



PEMERINTAH KOTA BLITAR

LKJIP 2023

**DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA BLITAR**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2023. LKjIP merupakan dokumen yang menjadi salah satu komponen dari siklus akuntabilitas yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan penyusunan LKjIP yang kemudian menjadi bahan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja tahun berikutnya. LKjIP yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 serta dokumen Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2023 ini, adalah perwujudan akuntabilitas kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian kinerja sesuai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan.

Sebagai salah satu dokumen evaluasi kinerja, melalui LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan program, sehingga dalam perumusan kebijakan dan program ke depannya dapat lebih tepat sasaran dan implementatif. Selain itu, melalui LKjIP ini akan dapat dicermati kendala yang ada dalam mengimplementasikan program dan kegiatan, mengetahui penyebab kegagalan sekaligus merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Demikian LKjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2023 ini, diharapkan semua pihak yang mendukungnya mampu melakukan evaluasi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya peningkatan pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab. Semoga LKjIP ini bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman serta ditindaklanjuti oleh semua pihak.

Blitar, 12 Pebruari 2024





RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar selama tahun 2023. Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kota Blitar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melaksanakan tugas pada urusan pemerintah daerah di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Pangan, sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki 3 (tiga) rumusan tujuan dan 6 (enam) rumusan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan telah tercantum dalam Dokumen Rencara Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021-2026. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya, serta dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Walaupun terjadi inflasi terutama pada bahan pangan pokok dan terjadi cuaca ekstrim, namun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, capaian kinerja tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2022 memperoleh capaian di atas 100% (**Sangat Berhasil**) seperti pada tabel berikut :

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Capaian	Realisasi	%
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (angka)	74,68	79,25	106,12
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	84,71 (A)	84,77 (A)	100,07
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (miliar rupiah)	197,81	213,52	107,94

Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar Tahun 2023 sebesar 79,25 atau mencapai 106,12% dari target daerah sebesar 74,68. IKP Kota Blitar berada pada Zona Hijau yang berarti Kota Blitar memiliki ketahanan pangan yang sangat baik. Sedangkan dalam tata kelola perangkat daerah Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 mendapat nilai 84,77 point masuk kategori A (**Memuaskan**) dan mencapai 100,07% dari target yang ditetapkan sebesar 84,71



point. Dari hasil evaluasi didapatkan bahwa ada perkembangan positif terutama pada Aspek Pelaporan Kinerja. Produktivitas pertanian dan perikanan yang ditunjukkan dengan nilai PDRB ADHB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada Tahun 2023 mencapai 213,52 miliar rupiah dan mencapai 107,94% dari target sebesar 196,82 miliar rupiah.

Sedangkan untuk capaian sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH Konsumsi (angka)	86,5	87,7	101,39
Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD (angka)	84,71	84,77	100,07
Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah Produksi tanaman pangan dan hortikultura (kwintal)	198.206,74	240.477,00	121,33
Terjaganya produksi hasil peternakan	Jumlah Produksi hasil peternakan (kwintal)	84.651,00	100.122,81	118,28
Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Jumlah Produksi hasil budidaya ikan konsumsi (kwintal)	2.464,92	2.485,00	100,81
	Jumlah Produksi hasil budidaya ikan hias (ekor)	4.719.626	4.719.733	100
	Rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan (persen)	31,2	81,28	260,51

Realisasi Skor PPH Konsumsi Tahun 2023 sebesar 87,7 point atau sebesar 101,39% dari target sebesar 86,5 point. Kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP pada Tahun 2023 mencapai 84,77 point atau mencapai 100,07% dari target daerah sebesar 84,71 point. Sedangkan untuk produksi tanaman pangan dan hortikultura sebesar 240.477 kwintal atau mencapai 121,33% dari target sebesar 198.206,74 kwintal. Capaian produksi hasil peternakan pada tahun 2023 sebesar 100.122,81 kwintal mencapai 118,28% dari target sebesar 84.651 kwintal. Indikator sasaran produksi hasil perikanan budidaya pada tahun 2023 untuk produksi hasil budidaya ikan konsumsi sebesar 2.485 kwintal mencapai 100,81% dari target sebesar 2.464,92 kwintal, produksi hasil ikan hias sebesar 4.719.733 ekor mencapai 100% dari target sebesar 4.719.626 ekor dan rata-rata nilai tambah produk hasil perikanan sebesar 81,28% mencapai 260,51% dari target sebesar 31,2%.

Blitar, 12 Februari 2024



EXECUTIVE SUMMARY

The 2023 Government Agency Performance Report (LKjIP) of the Blitar City Food Security and Agriculture Service was prepared as a form of accountability for the implementation of activities and performance achieved by the Blitar City Food Security and Agriculture Service during 2023. In supporting the achievement of the visionThe 2023 Government Agency Performance Report (LKjIP) of the Blitar City Food Security and Agriculture Service has been prepared to demonstrate the accountability of the department for its activities and achievements during 2023. The Food Security and Agriculture Service of Blitar City carries out its duties in the fields of agriculture, fisheries, animal husbandry, and food under the Blitar Mayor Regulation Number 50 of 2022. The department has 3 goals and 6 targets which will be achieved within a period of 5 years and have been included in the 2021-2026 Food and Agriculture Security Service Strategic Plan Document. The performance of the Food Security and Agriculture Service in 2023 has been evaluated by comparing the target performance indicators with their realization, as well as comparing the previous year's achievements. Despite inflation and extreme weather conditions, the performance of the department has been above 100% (Very Successful) for the year 2022, as per the 2023 Performance Agreement.

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Capaian	Realisasi	%
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	74,68 poin	79,25 poin	106,12%
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	84,71 (A)	84,77 (A)	100,07
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	197,81 miliar rupiah	213,52 miliar rupiah	107,94

The 2023 Blitar City Food Security Index is 79,25, which is 106,12% of the regional target of 74,68. The IKP of Blitar City is in the Green Zone, indicating that Blitar City has excellent food security. Meanwhile, in regional governance, the 2023 SAKIP score for the Food Security and Agriculture Service received 84.77 points in category A (Satisfactory) and reached 100.07% of the target set at 84.71 points. From the evaluation results, it was found that there were positive developments, especially in the Performance Reporting Aspect. The productivity of agriculture and fisheries as indicated by the ADHB GRDP value for the Agriculture, Forestry, and Fisheries Category in 2023 will reach 213,52 billion rupiah and reach 107,94% of the target of 197,81 billion rupiah. This achievement has increased compared to 2022. The Lumpy Skin Disease (LSD) outbreak and the long drought had quite an impact on reducing agricultural, livestock, and fisheries production.



Targets achieved by the Department of Food Security and Agriculture are as follows :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH Konsumsi (angka)	86,5	87,7	101,39
Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD (angka)	84,71	84,77	100,07
Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah Produksi tanaman pangan dan hortikultura (kwintal)	198.206,74	240.477,00	121,33
Terjaganya produksi hasil peternakan	Jumlah Produksi hasil peternakan (kwintal)	84.651,00	100.122,81	118,28
Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Jumlah Produksi hasil budidaya ikan konsumsi (kwintal)	2.464,92	2.485,00	100,81
	Jumlah Produksi hasil budidaya ikan hias (ekor)	4.719.626	4.719.733	100
	Rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan (persen)	31,2	81,28	260,51

The realization of the PPH Consumption Score in 2023 is 87.7 points, which is 101.39% of the target of 86.5 points. The performance of regional apparatus with the SAKIP Value indicator in 2023 reached 84.77 points, which is 100.07% of the regional target of 84.71 points. Meanwhile, food and horticultural crop production was 240,477 quintals, which is 121.33% of the target of 198,206.74 quintals. The achievement of livestock production in 2023 is 100,122.81 quintals, which is 118.28% of the target of 84,651 quintals. Target indicators for the production of aquaculture products in 2023 for the production of cultivated fish for consumption are 2,485 quintals, which is 100.81% of the target of 2,464.92 quintals, production of ornamental fish of 4,719,733 fish, which is 100% of the target of 4,719,626 fish and the average added value of fishery products was 81.28%, which is 260.51% of the target of 31.2%.

Blitar, 12 February 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Dasar Hukum	5
E. Aspek-Aspek Strategis	8
F. Isu-Isu Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis.....	9
B. Perjanjian Kinerja.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran	16
A.1 Analisa Capaian kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023.....	17
A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023.....	37
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target s/d Akhir Renstra , Realisasi Nasional dan Daerah Sekitar	38
B. Akuntabilitas Keuangan / Cost Per Outcame.....	41
C. Prestasi/Penghargaan	46
BAB IV PENUTUP.....	47

LAMPIRAN

- Rencana Strategis SKPD Tahun 2021-2026
- Rencana Kinerja Tahunan 2023
- Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Pengukuran Kinerja Tahun 2023



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang telah memberikan kewenangan utuh dan bulat kepada daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah, semangat reformasi di bidang politik, pemerintahan dan pembangunan juga mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, sehingga diperlukan sistem pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang dibuat melalui media pertanggungjawaban melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Laporan Kinerja ditujukan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya untuk perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.





Sehubungan dengan hal tersebut di atas, peranan LKjIP pada sebuah instansi adalah agar instansi dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan rencana serta sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Disamping sebagai kewajiban, maka penerapan SAKIP pada hakekatnya merupakan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas baik dari sisi perencanaan pelaksanaan maupun hasil-hasilnya yang dilaporkan dalam bentuk LKjIP sebagai bentuk pertanggungjawaban konkret atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyusunan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi, memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut :





- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan
- e. Pengkajian pemberian izin serta pencabutan izin bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan
- f. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
- g. Peremajaan data dalam bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan untuk tingkat kota
- h. Koordinasi penyediaan infrasrtuktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
- i. Pengembangan sarana prasarana pertanian
- j. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak
- k. Pembinaan produksi di bidang pertanian
- l. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan
- m. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
- n. Pelaksanaan penyuluhan pertanian
- o. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, katatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan
- p. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja





- q. Penyenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor
- r. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayana Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- s. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- t. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan
- u. Pengelolaan pengaduan masyarakat
- v. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah
- w. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian
 - a. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai kewenangan :

- a. Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
- b. Perencanaan operasional program ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
- c. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan, di tingkat kota;
- d. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan.





Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang.
 - c. Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan
 - e. Bidang Peternakan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

C. MAKSLUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar selama satu Tahun 2022, dengan tujuan :

- 1) Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Pemerintah Kota Blitar, Provinsi, Pusat maupun Masyarakat;
- 2) Memberikan informasi capaian sasaran pembangunan daerah guna penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026);
- 3) Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan datang;
- 4) Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

D. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;





2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;





13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2023;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;





24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

E. ASPEK – ASPEK STRATEGIS

Sebagai unsur penunjang, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki Aspek-aspek Strategis yang dapat menunjang dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, diantaranya sebagai berikut:

1. Perumus kebijakan teknis dan pelaksana program urusan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
2. Pembina dan pendamping kelompok petani, peternak, pembudidaya ikan, pelaku usaha bidang pertanian, peternakan dan perikanan.
3. Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 untuk peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan; peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan serta peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi dan industrialisasi bidang pertanian dan pangan.

F. ISU – ISU STRATEGIS

Berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021 - 2026 Isu Strategis yang ditangani Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penanganan penduduk rawan pangan di Kota Blitar.
2. Perdagangan bebas komoditas pertanian mensyaratkan adanya standarisasi produk untuk mampu bersaing.
3. Penurunan luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan serta penurunan kualitas lahan persawahan.
4. Pengaruh iklim ekstrim terhadap penurunan produksi tanaman, perikanan dan peternakan.
5. Terjadinya wabah Lumphy Skin Disease (LSD) pada ternak ruminansia (sapi).





BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu dengan memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam perencanaan kinerja disusun suatu tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia.

KOTA BLITAR

A. RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah **Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermatabat**. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar sebagai salah satu pengampu indikator kinerja utama dari misi ke-3 yaitu “: **Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital**”.

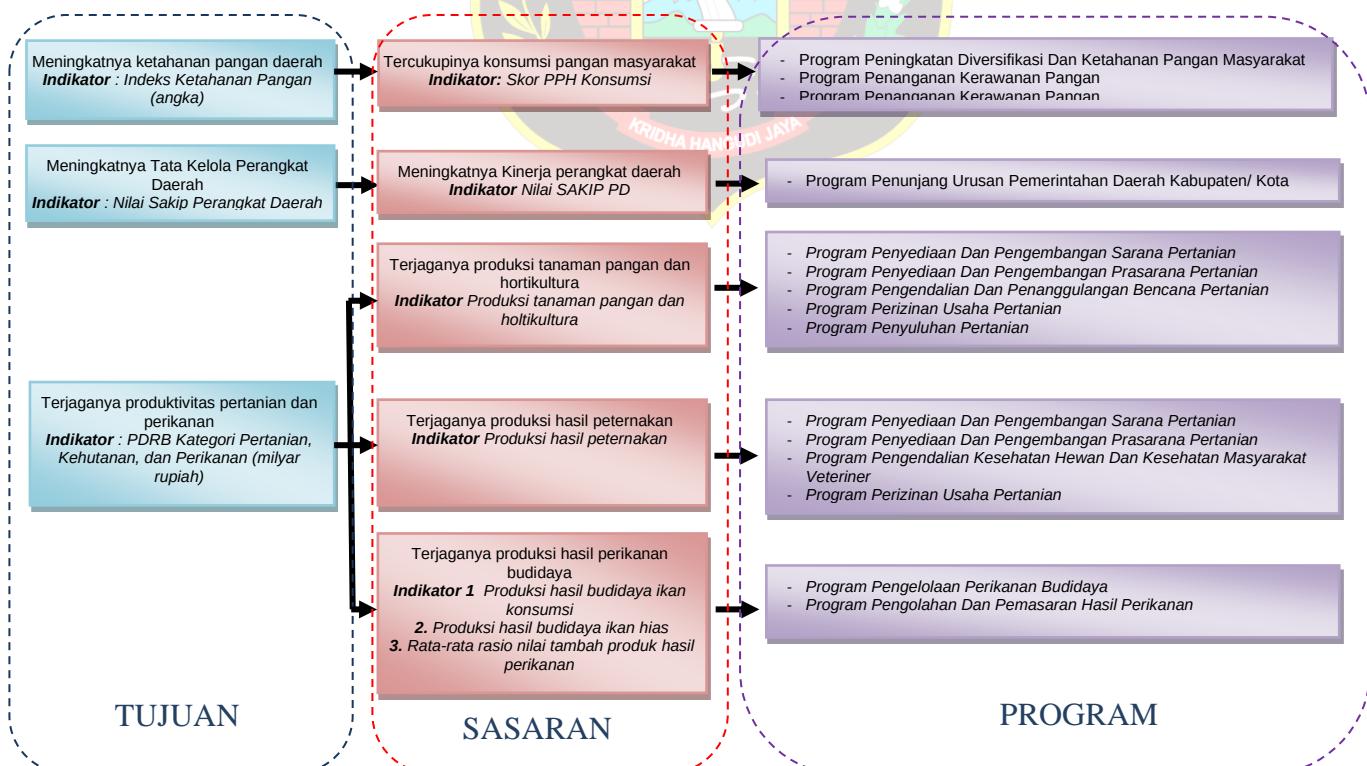


Bagan 2.1.
Keterkaitan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan RPJMD Kota Blitar

RPJMD Kota Blitar 2021-2026	RENSTRA DKPP 2021-2026
<p>Visi Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermartabat</p> <p>Misi 3 : Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital</p> <p>Tujuan 1: Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat Sasaran 2: Meningkatnya ketahanan pangan daerah</p> <p>Tujuan 2: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sasaran 5: Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan</p> <p>Misi 5 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersifat Berbasis Teknologi Informasi</p> <p>Tujuan: Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi Sasaran 7: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah</p>	<p>Tujuan 1 Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat Sasaran: <i>Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat</i> Indikator : Skor PPH Konsumsi</p> <p>Tujuan 2 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sasaran 1: <i>Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura</i> Indikator : Produksi tanaman pangan dan hortikultura</p> <p>Sasaran 2: <i>Terjaganya produksi hasil peternakan</i> Indikator : Produksi hasil budidaya ikan konsumsi</p> <p>Sasaran 3: <i>Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya</i> Indikator 1: Produksi hasil budidaya ikan konsumsi Indikator 2: Produksi hasil budidaya ikan hias Indikator 3: Rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan</p> <p>Tujuan 3 Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi Sasaran: <i>Meningkatnya Kinerja perangkat daerah</i> Indikator : Nilai SAKIP PD</p>

Berpedoman pada visi Pemerintah Kota Blitar tersebut maka tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang tertuang dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Bagan 2.2
Matrik Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar





Sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) dari Pemerintah Kota Blitar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar akan secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2023 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar perlu menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia serta piranti lunak lainnya untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan rencana program kerja tahunan PD dengan menetapkan Tujuan, Sasaran dan Program Kerja yang akan dipedomani sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam mengoperasionalkan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk pencapaian visi dan misi Kota Blitar adalah sebagai berikut :



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pada Renstra Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (angka)			74,18	74,68	75,18	75,68	76,18
		Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	86,25	86,5	86,75	87	88,5
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah			84,7 (A)	84,71 (A)	84,73 (A)	84,75 (A)	84,77 (A)
		Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	84,7 (A)	84,71 (A)	84,73 (A)	84,75 (A)	84,77 (A)
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (miliar rupiah)			196,82	197,81	198,8	199,79	200,79
		Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura (dalam kwintal)	198.186,93	198.206,74	198.325,67	198.444,66	198.563,73
		Terjaganya produksi hasil peternakan	Jumlah produksi hasil peternakan (dalam kwintal)	84321,66	84651,19	84827,72	85042,36	85356,3

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
		Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi (dalam kwintal)	2.404,80	2.464,92	2.489,33	2.519,10	2.549,33
			Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias (ekor)	4.698.482	4.719.625	4.740.863	4.762.197	4.783.627
			Rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan	30,6	31,2	31,8	32,4	33



Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Renstra Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Blitar

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Skor PPH Konsumsi	Angka	86,25	86,5	86,75	87	88,5
2	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	Kwintal	198.186,93	198.206,74	198.325,67	198.444,66	198.563,73
3	Jumlah produksi hasil peternakan	Kwintal	84.322	84.651	84.828	85.042	85.356
4	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi	Kwintal	2.404,80	2.464,92	2.489,33	2.519,10	2.549,33
5	Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias	ekor	4.698.482	4.719.626	4.740.864	4.762.198	4.783.628

Adapun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 secara terperinci sebagaimana dalam "Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2021 – 2026" .

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar diuraikan dalam tabel berikut ini :





Tabel. 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	86,5
2.	Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	A (84,71)
3.	Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	198.206,74 kwintal
4.	Terjaganya produksi hasil peternakan	Jumlah produksi hasil peternakan	84.651,19 kwintal
5.	Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias Rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan	2.464,92 kwintal 4.719.625 ekor 31.20 %

Sedangkan Rencana Kinerja (RKT) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023.





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/SASARAN

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja pada tahun 2023, realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022), serta realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra 2021-2026.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil



A.1 Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target Dan Realisasi Tahun 2023

Analisa dan evaluasi dilakukan terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Hal ini akan bermanfaat untuk penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang.

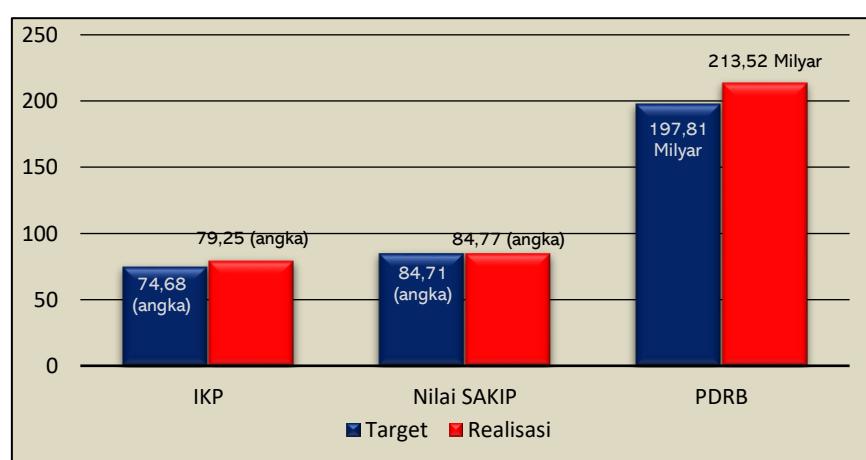
A.1.1 Tujuan

Capaian Kinerja Tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Capaian Tujuan Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Tahun 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Capaian	Realisasi	%	Interpretasi Capaian
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	74,68 poin	79,25 poin	106,12	Sangat Berhasil. Kota Blitar masuk dalam kategori memiliki ketahanan pangan paling baik (Zona Hijau)
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	84,71 (A)	84,77 (A)	100,07	Sangat Berhasil. Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja baik dan sangat akuntabel
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	197,81 miliar rupiah	213,52 miliar rupiah	107,94	Sangat Berhasil

Grafik 3.1
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2023





Tujuan Strategis : Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

➤ Indikator Kinerja : Indeks Ketahanan Pangan Daerah (IKP)

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan suatu sistem penilaian yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan yang terdiri dari sembilan indikator yang merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Sembilan indikator yang digunakan tersebut beserta bobot nilainya adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Bobot Indikator Perhitungan IKP

No	Indikator	Bobot
ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN		
1.	Rasio kosumi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah	-
		Sub Total -
ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN		
2.	Percentase penduduk di bawah garis kemiskinan	0,20
3.	Percentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	0,125
4.	Percentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,125
		Sub Total 0,45
ASPEK PEMANFAATAN PANGAN		
5.	Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun	0,08
6.	Percentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,18
7.	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,08
8.	Percentase balita <i>stunting</i>	0,08
9.	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,13
		Sub Total 0,55

Khusus untuk analisis wilayah perkotaan hanya digunakan delapan indikator dari aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, karena ketersediaan pangan di tingkat perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar wilayah. Hasil dari analisis 9 indikator ini menghasilkan nilai IKP yang dikelompokkan menjadi 6 kelompok, dimana kelompok 1 adalah daerah yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dari pada

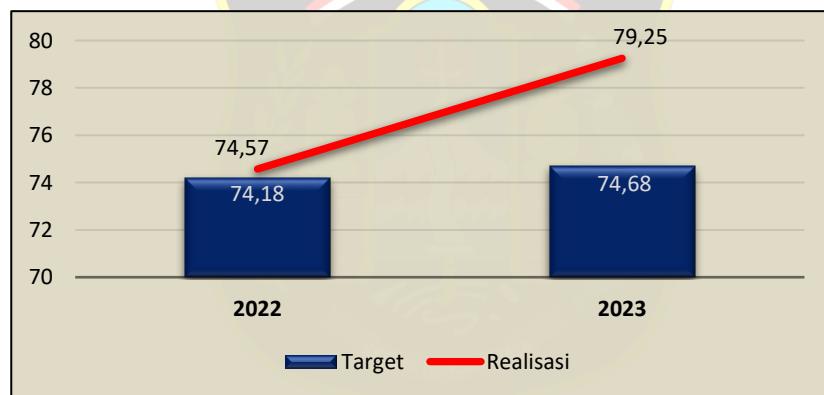


daerah dengan kelompok diatasnya. Sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan daerah yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Cut Off Point IKP di sajikan pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.3
Cut Off Point Indeks Ketahanan Pangan

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota	Provinsi
1	<= 41,52	<= 28,84	<= 37,61
2	> 41,52 – 51,42	> 28,84 – 41,44	> 37,61 – 48,27
3	> 51,42 – 59,58	> 41,44 – 51,29	> 48,27 – 57,11
4	> 59,58 – 67,75	> 51,29 – 61,13	> 57,11 – 65,96
5	> 67,75 – 75,68	> 61,13 – 70,64	> 65,96 – 74,40
6	> 75,68	> 70,64	> 74,40

Grafik 3.2
Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar Tahun 2022 – 2023



Capaian Indeks Ketahanan Pangan Daerah pada tahun 2023 sebesar 79,25 atau mencapai 106,12% dari target yang telah ditetapkan dengan kategori **Sangat Berhasil**. Capaian Indeks Ketahanan Pangan Daerah pada tahun 2023 meningkat dibandingkan capaian tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketahanan pangan Kota Blitar masuk dalam Zona Hijau atau masuk dalam kategori memiliki ketahanan pangan yang paling baik. Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar menduduki peringkat ke 70 dari 98 Kota di seluruh Indonesia.

Dari aspek keterjangkauan pangan Kota Blitar mengalami peningkatan sebesar 8,52 % dari 81,82 poin pada tahun 2022 menjadi 88,79 poin pada tahun 2023. Persentase penduduk miskin di Kota Blitar mengalami penurunan sebesar 0,07%





dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin kota Blitar mencapai 10,65 ribu jiwa turun menjadi 10,61 ribu jiwa pada tahun 2023. Sedangkan untuk aspek pemanfaatan juga mengalami kenaikan sebesar 4,08% dari 68,65 poin pada tahun 2022 menjadi 71,45 poin pada tahun 2023. Akan tetapi terjadinya inflasi pada bahan pangan pokok yang di pengaruhi oleh kondisi cuaca ekstrim (el-Nino), kondisi regional maupun internasional menyebabkan kenaikan prosentase pengeluaran perkapita untuk pangan meningkat sebesar 0,64 poin dari 42,74% pada tahun 2022 menjadi 43,38% pada tahun 2023.

Pada tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar telah melaksanakan sosialisasi pola pangan sehat dan pemberian bantuan bahan pangan tambahan kepada kelompok rawan pangan sebagai upaya penanggangan stunting yang diberikan sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun. Selain itu juga dilaksanakan pemberian pelatihan, pendampingan dan bantuan modal usaha kepada kelompok tani, kelompok perikanan yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan. Selain itu sebagai upaya penajmian ketersediaan pangan dan antisipasi terjadinya inflasi perlu optimalisasi pelaksanaan pemantauan secara rutin harga pasar komoditas pangan pokok dan stok pangan digudang toko pangan bekerja sama dengan instansi terkait serta optimalisasi peran Satuan Tugas Pangan Kota Blitar.

Tujuan Strategis : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah

➤ Indikator Kinerja : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Grafik. 3.3
Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar
Tahun 2022 - 2023





Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP adalah integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan. Hasil evaluasi dari implementasi SAKIP Tahun 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mendapatkan peringkat A (memuaskan) dengan nilai 84,71 atau sebesar 100,07% dari target yang telah ditetapkan dengan kategori **Sangat Berhasil**. Angka ini turun dari capaian tahun sebelumnya yaitu 85,56.

Dari hasil evaluasi di dapatkan bahwa nilai perencanaan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar mengalami penurunan dari 27,67% menjadi 24,37%. Hal ini dikarenakan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dan belum memenuhi kriteria SMART. Akan tetapi dokumen perencanaan yang telah disusun sudah didukung dengan dokumen yang memadai, memenuhi standar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan sudah digunakan untuk pengukuran kinerja serta penyusunan sasaran kinerja pegawai atau SKP. Sehingga kedepan perlu adanya perumusan ulang indikator kinerja tujuan agar sesuai dengan kondisi yang ingin dicapai dan memenuhi kriteria SMART. Sedangkan dalam aspek pengukuran kinerja mengalami peningkatan dari 22,80% menjadi 25,67%. Pengukuran kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah dilaksanakan secara periodik dan berjenjang. Selain itu capaian kinerja telah didukung dengan data kinerja yang cukup relevan, telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dan telah menerapkan ketercapaian pengukuran kinerja dalam aplikasi e-Kinerja sebagai dasar dalam pemberian TPP. Untuk optimalisasi pengukuran kinerja perlu adanya pengembangan aplikasi pengukuran kinerja yang mampu menyajikan data dukung kinerja yang akuntabel, relevan dan realtime. Untuk aspek pelaporan kinerja juga mengalami sedikit kenaikan dari 14,46% pada tahun 2022





menjadi 14,73% pada tahun 2023. Dalam aspek pelaporan kinerja, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah menyusun dokumen laporan kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah dipublikasikan tepat waktu melalui website. Untuk aspek Evaluasi Internal sedikit mengalami penurunan dari 20,63% pada tahun 2022 menjadi 20 % pada tahun 2023. Evaluasi internal pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah dilaksanakan dengan SDM yang memadai akan tetapi hasilnya belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sehingga kedepan perlu dilaksanakan sosialisasi tentang hasil evaluasi kinerja dan pelaksanakan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kinerja untuk masing-masing penanggungjawab kinerja individu maupun organisasi.

Tujuan Strategis : Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan

- **Indikator Kinerja : PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.**

Grafik 3.4
PDRB ADHB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Blitar
Tahun 2022 – 2023



Produk Domestik Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor pertanian yang tumbuh dari suatu daerah. Dengan kata lain PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah dalam suatu waktu tertentu. Dalam menyusun PDRB digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu lapangan usaha dan pengeluaran yang menghasilkan komposisi data nilai tambah dirinci menurut lapangan usaha baik yang dihitung berdasarkan harga berlaku maupun harga konstans. Dalam pengukuran produktivitas pertanian dan perikanan digunakan





indikator PDRB menurut lapangan usaha berdasarkan harga berlaku sektor pertanian dan perikanan yang dapat menggambarkan kemampuan sumberdaya ekonomi sektor pertanian dan perikanan di Kota Blitar. Untuk Kota Blitar, PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dihitung dari komponen produk primer dari sub sektor pertanian (pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian) dan sub sektor perikanan, dikarenakan Kota Blitar tidak memiliki hutan. Pada tahun 2023 nilai PDRB ADHB untuk sektor pertanian dan perikanan adalah sebesar 213,52 miliar rupiah atau sebesar 107,94% dari target yang telah ditetapkan. Capaian PDRB ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022. Peningkatan nilai PDRB dikarenakan adanya peningkatan produksi tanaman pangan, peternakan (daging) dan perikanan. Selain itu kenaikan harga beberapa komoditas seperti gabah dan telur turut menyumbang kenaikan PDRB sektor pertanian. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian PDRB adalah dengan melakukan pengawasan dan penanggangan wabah LSD melalui pengadaan obat-obatan dan pelaksanaan vaksinasi; pemantauan HPT pada tanaman pangan serta menggiatkan petani untuk membuat pupuk secara mandiri melalui pelatihan dan pemberian bantuan pembuatan pupuk organik untuk mengurangi beban produksi dan meningkatkan hasil produksi.

A.1.2 Perjanjian Kinerja

Sedangkan untuk capaian kinerja yang merupakan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun Anggaran 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Inteprestasi Capaian
Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH Konsumsi	angka	86,50	87,70	101,39	Sangat Berhasil
Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	angka	84,71	84,77	100,07	Sangat Berhasil
Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	kwintal	198.206,74	240.477,00	121,33	Sangat Berhasil
Terjaganya produksi hasil peternakan	Jumlah produksi hasil peternakan	kwintal	84.651,00	100.122,81	118,28	Sangat Berhasil
Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi	kwintal	2.464,92	2.485,00	100,81	Sangat Berhasil
	Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias	ekor	4.719.626	4.719.733	100,00	Sangat Berhasil
	Rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan	persen	31,2	81,28	260,51	Sangat Berhasil





Sasaran 1: Tercukupinya Konsumsi Pangan Masyarakat

Indikator Kinerja : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi merupakan indikator mutu gizi dan keberagaman konsumsi pangan. Dengan pendekatan PPH, perencanaan penyediaan dan konsumsi pangan penduduk tidak hanya untuk dapat memenuhi kecukupan gizi (*Nutritional Adequacy*), tetapi sekaligus mempertimbangkan keseimbangan gizi (*Nutritional Balance*) yang didukung oleh cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli (*affordability*). Semakin tinggi nilai Skor PPH Konsumsi menunjukkan situasi konsumsi pangan yang semakin beragam, seimbang dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.

KOTA BLITAR
Diagram 3.5
Skor PPH Konsumsi Tahun 2022-2023



Skor PPH Konsumsi mengalami peningkatan dari 86,31 pada Tahun 2022 menjadi 87,70 pada tahun 2023 atau mencapai 101,39% dari target 86,50 dengan kategori **Sangat Berhasil**. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun dalam kondisi inflasi bahan pangan yang terjadi, kebutuhan konsumsi masih dapat terpenuhi dan secara kualitas mengalami peningkatan. Penghitungan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dilakukan melalui pendekatan analisis konsumsi pangan. Analisis konsumsi pangan dilakukan melalui survei konsumsi pangan di 21 kelurahan untuk mengetahui pola konsumsi dan tingkat konsumsi energi masyarakat.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 untuk mendorong peningkatan kualitas konsumsi pangan adalah pembinaan KWT pengelola P2L,



pemberian bahan makanan tambahan untuk balita gizi kurang, pelatihan diversifikasi pangan untuk pemenuhan pangan yang Beragam Bergizi Sehat Aman dan Halal (B2SAH). Selain itu pada tahun 2023 Kota Blitar mendapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Badan Pangan Nasional sebanyak 8.294 keluarga penerima manfaat. Selain itu posisi Kota Blitar sebagai kota perdagangan memberikan keuntungan dengan adanya perdagangan antar wilayah sekitar (Kab. Blitar, Kab. Tulungagung) sehingga ketersediaan pangan cukup untuk masyarakat Kota Blitar. Walaupun demikian berdasarkan hasil analisis konsumsi pangan tahun 2023 didapatkan hasil bahwa konsumsi kelompok padi-padian mencapai skor 29,3 dari skor maksimal 25,0 sebesar 1.258 kkal/kapita/hari dimana 85,1 % nya berasal dari beras. Konsumsi beras mengalami kenaikan sebesar 51,14% dibandingkan dari tahun 2022 yang mencapai 182,48 kkal/kapita/hari. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi beras sebagai sumber kalori masih tinggi. Sehingga perlu adanya keberlanjutan pelatihan diversifikasi pangan dan sosialisasi pola pangan seimbang (B2SAH).

KOTA BLITAR
Tabel. 3.5
Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Kota Blitar
Tahun 2023

No	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kkal/Kapita	% Aktual	% AKE*	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	1.258,0	61,9	58,5	0,5	31,0	29,3	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	41,0	2,0	1,9	0,5	1,0	1,0	2,5	1,0
3	Pangan Hewani	229,0	11,3	10,6	2,0	22,5	21,3	24,0	21,3
4	Minyak dan Lemak	147,0	7,3	6,9	0,5	3,6	3,4	5,0	3,4
5	Buah/Biji Berminyak	32,0	1,6	1,5	0,5	0,8	0,7	1,0	0,7
6	Kacang-Kacangan	109,0	5,3	5,0	2,0	10,7	10,1	10,0	10,0
7	Gula	56,0	2,8	2,6	0,5	1,4	1,3	2,5	1,3
8	Sayur dan Buah	107,0	5,3	5,0	5,0	26,5	25,0	30,0	25,0
9	Lain-lain	52,0	2,6	2,4	-	-	-	-	-
TOTAL		2.031,0	100,0	94,5		97,4	98,6	100,0	87,7

Sumber : Laporan Analisis Konsumsi Pangan Tahun 2023 (AKE : 2150 kkal/kap/hari)

Keterangan:

- (+) adalah kelompok bahan makanan yang mencapai skor PPH maksimum
 (-) adalah kelompok bahan makanan yang belum mencapai skor PPH maksimum



Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Nilai Sakip Perangkat Daerah

Penilaian Implementasi SAKIP pada perangkat daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan sehat. SAKIP merupakan salah satu area dalam reformasi birokrasi yang wajib di laksanakan oleh perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Grafik 3.6

Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022-2023



Berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh APIP, pada tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar memperoleh predikat Memuaskan (A) dengan nilai 84,77 dan mencapai 100,07% dari target sebesar 84,71. Hasil ini mengalami penurunan dibandingkan dengan perolehan nilai dari tahun 2022 yaitu 85,56 atau menurun sebesar 0,92%.

Sasaran 3 : Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura

Indikator Kinerja : Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura

Sebagai daerah perkotaan, ketersediaan pangan di Kota Blitar lebih banyak didukung oleh perdagangan antar daerah disekitarnya. Akan tetapi walaupun bukan sebagai penyedia utama dalam pemenuhan ketersediaan pangan daerah, sub sektor tanaman pangan dan hortikultura tetap memegang peranan penting dalam pergerakan perekonomian di Kota Blitar. Selain itu untuk menjamin ketersediaan pangan minimal seperti yang diamanatkan dalam undang-undang, setiap daerah harus memiliki lahan abadi untuk produksi pangan berkelanjutan yang disebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Peningkatan produktivitas pertanian dapat dilihat dari



kemampuan lahan berproduksi dalam 1 (satu) tahun. Jumlah produksi total yang dihasilkan berasal dari produksi tanaman pangan dan hortikultura yang diusahakan dalam satu tahun.

Grafik 3.7
Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kwintal) Tahun 2022-2023



Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2023 sebesar 240.477 kwintal atau sebesar 121,33% dari target sebesar 198.206,74 kwintal. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 1,91% di bandingkan pada tahun 2022 dimana jumlah produksi mencapai 245.151 kwintal. Sedangkan produksi per jenis tanaman dapat dilihat dari grafik dibawah ini.

Grafik 3.8
Produksi Tanaman Pangan, Sayuran dan Buah-Buahan (Kwintal)
Tahun 2022-2023





Produksi tanaman pangan dan hortikultura ini terdiri dari komoditas tanaman pangan, buah-buahan dan sayuran. Produksi tanaman pangan pada tahun 2023 mencapai 182.254,10 kwintal dan mengalami peningkatan sebesar 2,27% dibandingkan tahun 2022. Demikian juga untuk produksi sayuran mencapai 5.351,20 kwintal dan mengalami peningkatan sebesar 14,54% dibandingkan tahun 2022. Sedangkan produksi buah-buahan mengalami penurunan sebesar 15,10% dibandingkan dengan tahun kemarin.

Tabel. 3.6

Produksi Tanaman Pangan, Sayuran dan Buah-Buahan Per Jenis Komoditas (Kwintal)
Tahun 2022-2023

No	Komoditas	2022	2023	% Peningkatan / Penurunan
		A. Tanaman Pangan		
1	Padi Sawah	101.911,00	81.696,00	-19,84
2	Jagung Sawah	73.255,00	96.944,10	32,34
3	Ubi Jalar/Ketela Rambat	220,00	440,00	100,00
4	Kacang Tanah	2.820,00	3.174,00	12,55
	Jumlah Tanaman Pangan	178.206,00	182.254,10	2,27
B. Sayuran				
1	Kacang Panjang	-	32,00	100,00
2	Kembang Kol	180,00	162,00	100,00
3	Kentang	360,00	-	
4	Petsai/Sawi	416,00	461,00	10,82
5	Cabe Besar	1.495,00	64,00	-95,72
6	Cabe Rawit	723,70	1.639,00	126,48
7	Paprika	386,00	-	
8	Jamur Tiram	210,96	974,20	361,79
9	Tomat	790,00	456,00	-42,28
10	Labu Siam	10,50	-	-100,00
11	Terung	-	728,00	100,00
12	Kangkung	100,00	835,00	735,00
	Jumlah Sayuran	4.672,16	5.351,20	14,53
C. Buah-Buahan				
1	Alpukat	1.190,20	1.138,40	-4,35
2	Belimbing	31.855,10	24.706,00	-22,44
3	Duku/Langsat/Kokosan	70,30	68,60	-2,42
4	Durian	447,50	482,60	7,84
5	Jambu Biji	182,50	171,00	-6,30
6	Jambu Air	191,00	191,00	0,00
7	Jeruk Siam/Keprok	135,00	134,00	-0,74
8	Mangga	8.353,00	8.461,00	1,29
9	Manggis	61,40	66,00	7,49
10	Nangka	135,00	232,00	71,85
11	Pepaya	8.810,50	7.182,90	-18,47
12	Pisang	680,70	663,20	-2,57
13	Rambutan	9.959,70	9.169,00	-7,94
14	Sawo	123,00	127,00	3,25
15	Sirsak	47,00	48,00	2,13
16	Sukun	31,00	31,00	0,00
	Jumlah Buah-Buahan	62.272,90	52.871,70	-15,10





Peningkatan produksi tanaman pangan terjadi pada komoditas kacang tanah, jagung dan ketela rambat/pohon. Sedangkan untuk produksi padi mengalami penurunan sebesar 19,84%. Hal ini disebabkan terjadinya kekeringan panjang sebagai akibat dari el-nino sehingga petani lebih banyak mebudidayakan tanaman palawija. Sedangkan pada komoditas sayuran yang banyak diusahakan berupa komoditas yang lebih tahan terhadap kekeringan dan mempunyai nilai jual yang tinggi seperti Cabe Rawit, Jamur Tiram, Terung dan Kangkung. Kekeringan panjang juga berdampak pada penurunan produksi buah-buahan. Selain itu dilakukannya pemugaran pohon yang sudah tidak berproduksi serta adanya pohon belum masuk dalam masa produksi juga membuat produksi tanaman buah-buahan menurun terutama untuk komoditas Belimbing.

Untuk menjaga produksi tanaman pangan dan hortikultura, pada tahun 2023 telah dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani, gabungan kelompok tani dan kelompok wanita tani secara rutin sebagai bentuk antisipasi terjadinya cuaca ekstrim untuk meminimalisir dampak yang terjadi. Pada Tahun 2023 juga dilaksanakan pelatihan dan pemberian bantuan pembuatan pupuk organik dan budidaya padi sehat (PTPS) yang kedepannya akan terus dilaksanakan secara berkelanjut. Pelatihan PTPS di berikan kepada 4 kelompok tani di Kel. Ngadirejo (2 kelompok), Kel. Tanggung (1 kelompok) dan Kel. Pakunden (1 kelompok). Sedangkan pelatihan dan pemberian bantuan peralatan pembuatan pupuk organik diberikan kepada 16 kelompok yaitu di Kel. Klampok (5 kelompok), Kel. Sentul (1 kelompok), Kel. Tanjungsari (1 kelompok), Kel. Pakunden (2 kompok), Kel. Tlumpu (2 kelompok), Kel. Blitar (1 kelompok), Kel. Gedog (1 kelompok), Kel. Sentul (1 kelompok), Kel. Ngadirejo (1 kelompok) dan Kel. Plosokerep (1 kelompok). Peningkatan penggunaan pupuk organik selain untuk memenuhi kebutuhan pupuk akibat berkurangnya jumlah subsidi pupuk juga untuk wewujudkan pertanian yang berwawasan lingkungan yang nantinya mampu meningkatkan produksi tanaman dan kualitas hasil panen.





Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM petani, pada tahun 2023 juga dilaksanakan pelatihan dan pembinaan pada kelompok wanita tani (KWT) budidaya tanaman di pekarangan baik sayuran maupun tanaman hias yaitu pelatihan budidaya anggrek dan budidaya tanaman dalam polibag. Selain itu, KWT juga diberikan pelatihan tentang pengolahan dan pengemasan produk hasil pertanian dan produk herbal non pangan yang berbahan dasar mint. Hal itu diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian di pasaran serta mampu memberikan manfaat ekonomi bagi anggota kelompok wanita tani.

Sasaran 4 : Terjaganya produksi hasil peternakan

Indikator Kinerja : Produksi hasil peternakan

Sub Sektor Peternakan memiliki peran yang cukup besar dalam mendukung ketersediaan pangan terutama dalam penyediaan pangan yang berasal dari pangan hewani yang terdiri dari daging, susu dan telur. Pada tahun 2023 produksi hasil peternakan mencapai 100.122,81 kwintal atau sebesar 118,28% dari target sebesar 84.651 kwintal. Produksi hasil peternakan mengalami penurunan sebesar 4,63% di bandingkan dari tahun 2022.

Grafik 3.9

Produksi Hasil Peternakan (kwintal) Tahun 2022-2023



Produksi hasil peternakan terdiri dari 3 komoditas yaitu daging, telur dan susu. Pada tahun 2023 produksi daging mengalami kenaikan sebesar 5,10 % dari tahun 2022 atau mencapai 50.163,15 kwintal. Sedangkan untuk komoditas susu dan telur mengalami penurunan masing-masing sebesar 20,02% dan 11,75%. Penurunan produksi susu terutama disebabkan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD) yang menyebabkan penurunan produksi susu pada sapi perah. Selain itu sebagian peternak beralih ke budidaya sapi potong sehingga populasi sapi perah mengalami menurun. Terjadinya inflasi pada tahun 2023 menyebabkan daya beli masyarakat menurun berdampak pada jumlah pemotongan ayam pedaging juga mengalami penurunan. Sedangkan penurunan produksi telur disebabkan oleh kenaikan harga pakan ayam petelur sehingga sebagian peternak mengurangi populasi ternaknya. Sebagai upaya penanganannya pada tahun 2023 telah dilaksanakan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pemotongan di RPHR dan RPHU, pelatihan pembuatan pakan mandiri untuk peternak dan sosialisasi kepada pedagang untuk menggunakan jasa RPH dalam pemotongan ternaknya.

Grafik 3.10
Produksi Susu, Daging dan Telur (Kwintal) Tahun 2022-2023



Stabilisasi produksi hasil peternakan didukung oleh 3 faktor yaitu peningkatan kesehatan hewan ternak, peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dan penjaminan kesehatan dan keamanan Bahan Asal Hewan (BAH) serta pembinaan dan





pendampingan kelompok ternak. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan pemberian layanan terpadu kesehatan hewan dengan optimalisasi pelapor kelurahan, pemberian KIE tentang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, penerapan sertifikasi NKV dan pengujian sampel produk hasil peternakan sebagai jaminan terhadap keamanan produk asal hewan. Selain itu juga dilakukan pemantauan terhadap pengelolaan limbah ternak untuk meminimalisir pencemaran lingkungan. Sebagai upaya pencegahan dan penanganan wabah PMK dan LSD telah dilaksanakan vaksinasi dan pengadaan obat-obatan.

Sasaran 4 : Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya

Indikator Kinerja 1: Produksi hasil budidaya ikan konsumsi

Sektor perikanan merupakan salah satu pendukung perekonomian di Kota Blitar selain sebagai penyedia bahan pangan hewani. Komoditas perikanan yang diusahakan merupakan budidaya ikan konsumsi dan ikan hias. Pada tahun 2023 produksi ikan konsumsi mencapai 2.485 kwintal atau mencapai 100,81% dari target sebesar 2.464,92 kwintal. Produksi ikan konsumsi juga mengalami kenaikan sebesar 3,01% jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2022. Jumlah produksi ikan konsumsi pada tahun 2023 disajikan pada diagram berikut ini.

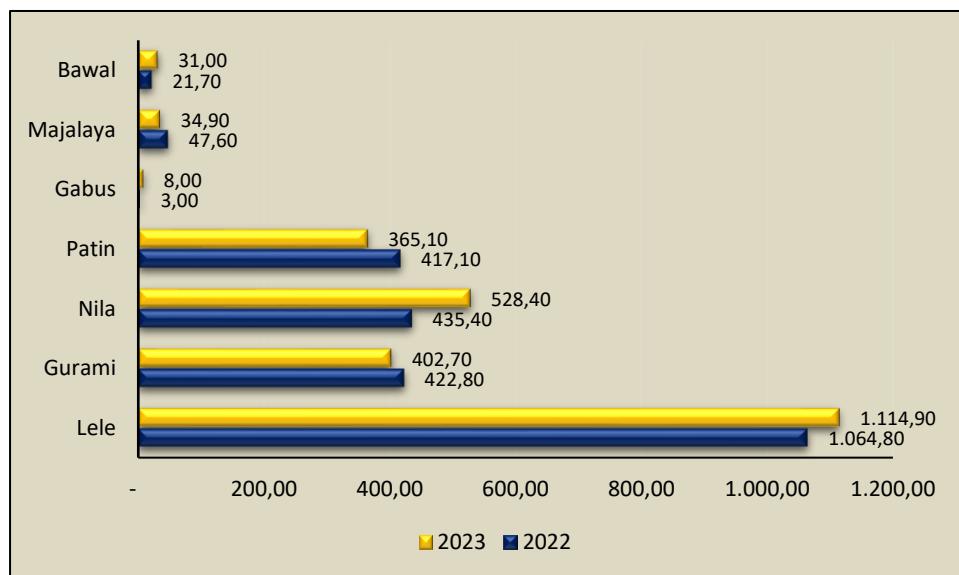
**Grafik 3.11
Produksi Ikan Konsumsi (Kwintal) Tahun 2022-2023**





Komoditas ikan konsumsi yang dibudidayakan di Kota Blitar adalah lele, gurami, nila, patin, gabus, majalaya dan bawal. Komoditas ikan lele memberikan kontribusi paling besar pada produksi ikan konsumsi yang kemudian diikuti dengan komoditas lainnya seperti gurami, nila, patin dan lainnya. Walaupun begitu setiap tahunnya preferensi jenis ikan konsumsi yang dibudidayakan mengalami perubahan tergantung terhadap permintaan pasar. Jumlah produksi ikan konsumsi berdasarkan jenisnya pada tahun 2023 disajikan pada diagram berikut ini.

Grafik 3.12
Produksi Ikan Konsumsi (Kwintal) Tahun 2022-2023



Pada tahun 2023 produksi ikan lele, nila, bawal dan gabus mengalami kenaikan masing-masing sebesar 7,71%, 21,36%, 42,86% dan 166,67%. Sedangkan untuk ikan gurami, patin dan majalaya mengalami penurunan sebesar 4,75%, 12,47% dan 26,68%. Pada tahun 2023, secara keseluruhan produksi ikan konsumsi mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun terjadi kekeringan panjang akibat dampak el-nino, budidaya perikanan di Kota Blitar mampu bertahan dan berkembang dengan baik. Upaya yang dilakukan adalah pembinaan, pendampingan dan pelatihan serta pengawasan kesehatan ikan dan lingkungan (kesanling) kepada pembudidaya di Kota Blitar. Pembudidaya ikan di Kota Blitar pada tahun 2023 sejumlah 395 orang dan sebanyak 44,09% telah mendapatkan pelatihan/pendampingan. Pelatihan yang



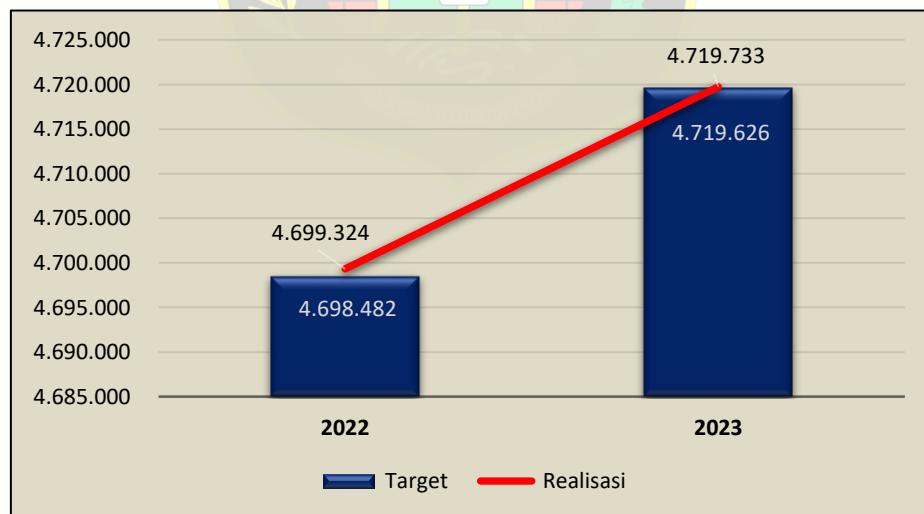


dilaksanakan pada tahun 2023 adalah pelatihan budidaya ikan koi untuk mendukung Kota Blitar sebagai Ibu Kota Koi Indonesia. Selain itu juga dilaksanakan pembinaan teknis manajemen budidaya perikanan (CPIB dan CBIB). Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produksi perikanan sehingga mampu memberikan nilai tambah perekonomian bagi pembudiaya.

Indikator Kinerja 2 : Produksi hasil budidaya ikan hias

Kota Blitar dikenal sebagai penghasil ikan hias terutama ikan koi. Selain Ikan Koi sebagai komoditas utama, ada beberapa jenis ikan hias lainnya yang dibudidayakan di Kota Blitar. Budidaya ikan hias mampu memberikan kontribusi yang bagus untuk pergerakan perekonomian di Kota Blitar. Pada tahun 2023 jumlah produksi ikan hias mencapai 4.719.733 ekor, mencapai 100 % dari target sebesar 4.719.626 ekor. Produksi ikan hias pada tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,43% dibandingkan kondisi pada tahun 2022. Produksi ikan hias tahun 2023 disajikan pada grafik berikut.

Grafik 3.13
Produksi Ikan Hias (Ekor) Tahun 2022-2023

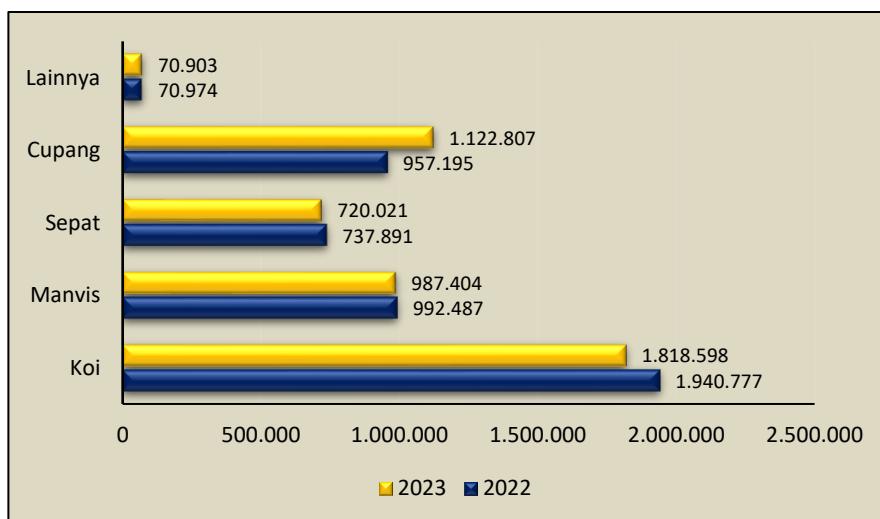


Komoditas ikan hias yang dibudidayakan paling banyak selain ikan koi, adalah ikan manvis, cupang, sepat dan sebagain kecil dari jenis guppy, goldenblack, chana dan mas koki. Seperti pada budidaya ikan konsumsi, preferensi jenis ikan pada



budidaya ikan hias sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar. Jumlah produksi budidaya ikan hias berdasarkan jenisnya pada tahun 2023 dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Grafik 3.14
Produksi Ikan Hias Menurut Jenisnya (Ekor) Tahun 2022-2023



Jumlah pembudidaya ikan hias di Kota Blitar sebanyak 98 pembudiaya. Selain pembinaan dan pendampingan secara rutin kepada pembudiaya ikan hias, untuk meningkatkan produksi dan jangkauan pemasaran pada tahun 2023 juga dilaksanakan promosi ikan hias yang dikemas dalam bentuk kontes dan lelang Ikan hias Kota Blitar yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pengiat dan komunitas ikan hias di Kota Blitar.

Indikator Kinerja 3 : Rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan

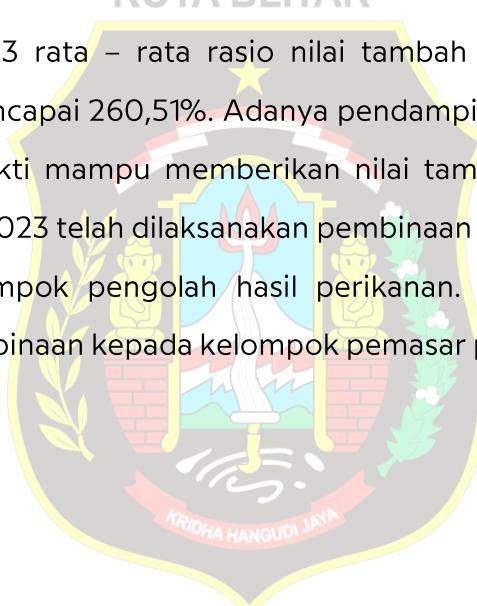
Nilai tambah atau *value added* adalah nilai ekonomi yang ditambahkan ke suatu produk sehingga produk tersebut lebih berkualitas dan bisa meningkatkan harga. Rasio nilai tambah produk perikanan menggambarkan pertambahan nilai pada suatu produk perikanan sebelum dan sesudah mendapat suatu perlakuan khusus yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Proses penambahan nilai produk perikanan bisa berupa perlakuan seperti pengolahan dan pengemasan. Penghitungan rasio nilai tambah ini menggunakan metode Hayami yaitu memperkirakan perubahan nilai per kilogram bahan baku setelah mendapatkan perlakuan.



Grafik 3.15
Rata-rata Rasio Nilai Tambah Produk Perikanan Tahun 2022 - 2023



Pada tahun 2023 rata – rata rasio nilai tambah produk olahan perikanan sebesar 81,28% atau mencapai 260,51%. Adanya pendampingan dan pelatihan olahan produk perikanan terbukti mampu memberikan nilai tambah untuk produk olahan perikanan. Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan pembinaan dan pelatihan produk hasil perikanan kepada kelompok pengolah hasil perikanan. Selain itu juga dilakukan pendampingan dan pembinaan kepada kelompok pemasar perikanan.



A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Tabel. 3.7
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 - 2023

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022	2023
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (angka)	74,57	79,25
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	85,56 (A)	84,77 (A)
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	200,34 miliar rupiah	213,52 miliar rupiah
Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH Konsumsi	84,69	87,7
Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	85,56 (A)	84,77 (A)
Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	231.866 kwintal	240.477kwintal
Terjaganya produksi hasil peternakan	Jumlah produksi hasil peternakan	90.994 kwintal	100.122,81 kwintal
Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi	2.400,20 kwintal	2.485,00 kwintal
	Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias	4.677.859 ekor	4.719.733 ekor
	Rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan	79,35 persen	81,28 persen

Sebagian besar capaian kinerja tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Indeks ketahanan pangan (IKP) naik dari 74,57 pada tahun 2022 menjadi 79,25 pada tahun 2023. PDRB kategori pertanian, kehutanan dan perikanan naik dari 200,34 miliar rupiah pada tahun 2022 menjadi 213,77 miliar rupiah pada tahun 2023. Skor PPH konsumsi juga mengalami kenaikan dari 84,69 pada tahun 2022 menjadi 87,7 pada tahun 2023. Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura mengalami kenaikan dari 231.866 kwintal pada tahun 2022 menjadi 240.477 kwintal pada tahun 2023. Jumlah produksi peternakan naik dari



90.994 kwintal pada tahun 2022 menjadi 100.122,81 kwintal. Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi dan ikan hias masing – masing mengalami kenaikan dari 2.400,20 kwintal dan 4.677.589 ekor pada tahun 2022 menjadi 2.485 kwintal dan 4.719.733 ekor pada tahun 2023. Demikian juga untuk rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan naik dari 79,35 persen menjadi 81,28 persen. Sedangkan untuk capaian indikator Nilai sakip mengalami penurunan dari 85,56 pada tahun 2022 menjadi 84,77 pada tahun 2023.

KOTA BLITAR

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target S/D Akhir Periode Renstra

Tabel. 3.8

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S/D AKHIR PERIODE RENSTRA

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target s/d 2026	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (angka)	76,18	79,25	104,03
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	84,77 (A)	84,77 (A)	100,07
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	200,79	213,52	106,34
Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Skor PPH Konsumsi	84,77 (A)	84,77 (A)	100,07
Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Nilai SAKIP PD	88,5	87,7	99,10
Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	198.563,73	240.477,00	121,11
Terjaganya produksi hasil peternakan	Jumlah produksi hasil peternakan	85.356,30	100.122,81	117,30
Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi	2.549,33	2.485,00	97,48
	Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias	4.783.627,00	4.719.733	98,66
	Rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan	33	81,28	246,30



Dari tabel diatas terlihat bahwa target akhir Renstra telah terpenuhi dengan capaian diatas 95% bahkan untuk beberapa indikator mencapai 100%. Indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) sampai tahun 2023 mencapai 104,03%, Nilai Sakip mencapai 100,07%, PDRB Kategori Pertanian, Perkebunan dan Perikanan mencapai 106,34%, Skor PPH Konsumsi mencapai 99,10%, produksi tanaman pangan dan hortikultura mencapai 121,11%, produksi hasil peternakan mencapai 117,30%, produksi budidaya ikan konsumsi mencapai 97,48%, produksi hasil budidaya ikan mencapai 98,66% dan rata-rata nilai tambah produk hasil perikanan mencapai 246,30%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Tabel. 3.9

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL DAN DAERAH SEKITAR

Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Nasional Tahun 2023	Realisasi Daerah Sekitar				Keterangan
				Kota Malang	Kota Madiun	Kota Kediri	Kota Pasuruan	
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (angka)	79,25	60,2	85,27	92,49	76,42	81,45	Laporan IKP Tahun 2023 Badan Pangan Nasional
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (milyar rupiah)	213,52	-	228,59	121,77	373,31	228,86	Sumber BPS



Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) diatas capaian nasional yaitu sebesar 60,20. Sedangkan dibandingkan dengan beberapa daerah di Jawa Timur, capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Blitar juga masih dibawah capaian dari Kota malang, Kota Madiun dan Kota Kediri, akan tetapi masih diatas Kota Pasuruan. Untuk PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan juga masih berada di bawah dari capaian Kota Malang, Kota Kediri, Kota Pasuruan tapi masih diatas capaian Kota Madiun.

KOTA BLITAR





B. AKUNTABILITAS KEUANGAN / COST PER OUTCOME

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan, dalam Laporan ini dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung yang merupakan Anggaran yang digunakan secara langsung untuk program pembangunan. Pengukuran kinerja keuangan per tujuan dan/atau sasaran yang menjadi kinerja utama (*cost per outcome*). Sedangkan untuk pengambilan kesimpulan dalam penghitungan akuntabilitas keuangan dilakukan evaluasi lanjutan dalam bentuk rasio ekonomi dan rasio efisiensi yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Rasio Ekonomi, merupakan nilai perbandingan antara realisasi anggaran belanja dibandingkan dengan rencana anggaran belanja, dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Rencana Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

2. Rasio Efisiensi, merupakan perbandingan antara rasio ekonomi dengan capaian kinerja, dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Rasio Ekonomi}}$$

Bila Rasio Efisiensi > 1 maka dapat dikatakan bahwa penggunaan sumberdaya EFISIEN. Sebaliknya, bila Rasio Efisiensi < 1 maka dapat dikatakan bahwa penggunaan sumberdaya TIDAK EFISIEN.

B.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Tabel. 3.10
ALOKASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Anggaran	% Anggaran
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	8.404.146.514	61,01
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (angka)	Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	178.232.144	1,29
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (miliar rupiah)	Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	2.535.630.086	18,41
		Terjaganya produksi hasil peternakan	Jumlah produksi hasil peternakan	1.816.843.354	13,19
		Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi	839.766.419	6,10
			Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias		
			Rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan		
JUMLAH				13.774.618.517	100,00

Secara keseluruhan alokasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 13.774.618.517 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran untuk tujuan meningkatnya tata kelola perangkat daerah dengan sasaran meningkatnya kinerja perangkat daerah adalah sebesar Rp. 8.404.146.514 atau sebesar 61,01%, tujuan meningkatnya ketahanan pangan daerah dengan sasaran tercukupinya konsumsi pangan masyarakat adalah sebesar Rp. 178.232144 atau 1,29% sedangkan anggaran untuk tujuan terjaganya produktifitas pertanian dan perikanan dengan sasaran terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura sebesar Rp. 2.535.630.086 atau sebesar 18,41%, terjaganya produksi hasil peternakan sebesar Rp. 1.816.843.354 atau 13,19% dan terjaganya produksi hasil perikanan budidaya sebesar Rp. 839.766.419 atau 6,10% dari total anggaran yang tersedia.

B.2 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran

Tabel. 3.11

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PER INDIKATOR KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	% Capaian	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran				
										Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	84,71 (A)	84,77 (A)	100,07	Meningkatnya Kinerja perangkat daerah (angka)	Nilai SAKIP PD	84,71 (A)	84,77 (A)	100,07	8.404.146.514	8.124.013.569	96,67		
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (angka)	74,68	79,25	106,12	Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat (angka)	Skor PPH Konsumsi	86,5	87,7	101,39	178.232.144	177.507.653	99,59		
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (milyar rupiah)	197,81	213,52	107,94	Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura (kwintal)	Jumlah Produksi tanaman pangan dan hortikultura	198.206,74	240.477,00	121,33	2.535.630.086	2.514.741.266	99,18		
					Terjaganya produksi hasil peternakan (kwintal)	Jumlah Produksi hasil peternakan	84.651,00	100.122,81	118,28	1.816.843.354	1.778.492.821	97,89		
					Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya (kwintal)	Jumlah Produksi hasil budidaya ikan konsumsi	2.464,92	2.485,00	100,81	839.766.419	826.478.639	98,42		
						Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias	4.719.626	4.719.733	100,00					
JUMLAH									31,2	81,28	260,51	13.774.618.517	13.421.233.948	97,43





Realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada tahun 2023 sebesar Rp. 13.421.233.948 atau sebesar 97,43% dari pagu anggaran sebesar Rp. 13.774.618.517. Dana tersebut digunakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2023 dengan capaian rata-rata 100%.

B.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel. 3.12
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
KINERJA TUJUAN TAHUN ANGGARAN 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100,07	96,67	1,04	Efisien
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (angka)	106,12	99,59	1,07	Efisien
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (miliar rupiah)	107,94	98,6	1,09	Efisien

Tabel. 3.13
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
KINERJA SASARAN TAHUN ANGGARAN 2023

Sasaran	Indikator sasaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	100,07	96,67	1,04	Efisien
Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH Konsumsi	101,39	99,59	1,02	Efisien
Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	121,33	99,18	1,22	Efisien
Terjaganya produksi hasil peternakan	Produksi hasil peternakan	118,28	97,89	1,21	Efisien
Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Produksi hasil budidaya ikan konsumsi	100,81	98,42	1,02	Efisien
	Produksi hasil budidaya ikan hias	100,00			
	Rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan	260,51			



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi dalam pencapaian kinerja utama dan sasaran strategis rata-rata diatas 1. Semakin tinggi rasio efisiensi berarti semakin efisien dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian target kinerja yang telah ditentukan. Untuk tujuan meningkatnya tata kelola perangkat daerah rasio efisiensi sebesar 1,04 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100,07% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 96,67% dan dikategorikan EFISIEN. Untuk tujuan meningkatnya ketahanan pangan daerah rasio efisiensi sebesar 1,07 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 106,12% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 99,59% dan dikategorikan EFISIEN. Sedangkan untuk mencapai tujuan terjaganya produkstifitas pertanian dan perikanan mencapai tingkat efisiensi sebesar 1,09 dan di kategorikan EFISIEN.

Untuk tingkat efisiensi pencapaian kinerja sasaran rata-rata rasio efisiensi diatas 1. Rasio efisiensi untuk sasaran meningkatnya kinerja perangkat daerah mencapai 1,04, tercukupinya konsumsi pangan mencapai 1,02, terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura sebesar 1,22, terjaganya produksi hasil peternakan sebesar 1,21 dan terjaganya produksi hasil perikanan budidaya sebesar 1,02.

Tercapainya kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dengan efisiensi anggaran dikarenakan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berkorelasi positif terhadap capaian kinerja. Untuk sektor pertanian dilaksanakannya pembinaan dan pendampingan kelompok tani, pelatihan dan bantuan usaha pada kelompok tani, vaksinasi LSD serta pelatihan pembuatan pakan dan pelayanan terpadu hewan ternak mampu meningkatkan hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura serta hasil produksi peternakan. Demikian juga sektor pangan, pemberian bantuan pangan tambahan, sosialisasi konsumsi pangan seimbang (B2SAH) mampu meningkatkan skor PPH Konsumsi. Sedangkan untuk sektor perikanan, tercapainya produksi perikanan didukung oleh pelaksanaan



kegiatan pedampingan dan sosialisasi pembudidaya ikan untuk peningkatan mutu hasil perikanan serta fasilitasi pemasaran untuk produk hasil perikanan. Selain itu ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan terlatih serta didukung adanya inovasi dalam peningkatan layanan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi instansi pemerintah. Pelatihan yang tepat, pengembangan keterampilan, dan penempatan personel yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja keseluruhan.

PRESTASI/PENGHARGAAN

1. Nilai Sakip OPD Tahun 2023 dengan Predikat A (Memuaskan) dengan nilai 84,77;
2. Unit Kerja dengan Penyampaian Data Daerah Dalam Anmgka Tahun 2023 Tercepat, Terlengkap, Terakurat dari BPS Kota Blitar;
3. Juara Favorit Lomba Masak serba Ikan Tingkat Nasional XIX dari Menteri Kelautan dan Perikanan;
4. Juara 2 lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi dari Gubernur Jawa Timur;
5. Award Peduli Ketahanan Pangan Bidang Distribusi Pangan dari Gubernur Jawa Timur;
6. Juara 2 Kota dengan kinerja mempertahankan Zero Reported Case PMK dari Satgas Penanganan PMK Provinsi Jawa Timur;
7. Juara 2 Ikan Varietas Asagi pada 22nd Blitar Koi Show dari Menteri Kelautan dan Perikanan;
8. Juara 3 Ikan Varietas Taisho Sanshoku pada 22nd Blitar Koi Show Menteri Kelautan dan Perikanan.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang telah dipergunakan selama satu tahun 2023.

A. KESIMPULAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar disusun berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar 2021-2026, dokumen Renja 2023, serta Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dalam laporan ini mengukur kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan Tujuan Renstra yang telah ditetapkan menjadi Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, yang terdiri atas tujuan dan sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar Tahun 2023 sebesar 79,25 (**Zona Hijau=Tahan Pangan**) atau mencapai 106,12% dari target daerah sebesar 74,68. Sedangkan dalam tata kelola perangkat daerah Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 mendapat nilai 84,77 point masuk kategori A (**Memuaskan**) dan mencapai 100,07% dari target yang ditetapkan sebesar 84,71 point. Produktivitas pertanian dan perikanan yang ditunjukkan dengan nilai PDRB ADHB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada Tahun 2023 mencapai 213,52 miliar rupiah dan mencapai 107,94% dari target sebesar 196,82 miliar rupiah. Realisasi Skor PPH Konsumsi Tahun 2023 sebesar 87,7 point atau sebesar 101,39% dari target sebesar 86,5 point. Kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP pada Tahun 2023 mencapai 84,77 point atau mencapai 100,07% dari target daerah sebesar 84,71 point. Sedangkan untuk produksi tanaman pangan dan hortikultura sebesar 240.477 kwintal atau mencapai 121,33% dari target



sebesar 198.206,74 kwintal. Capaian produksi hasil peternakan pada tahun 2023 sebesar 100.122,81 kwintal mencapai 118,28% dari target sebesar 84.651 kwintal. Indikator sasaran produksi hasil perikanan budidaya pada tahun 2023 untuk produksi hasil budidaya ikan konsumsi sebesar 2.485 kwintal mencapai 100,81% dari target sebesar 2.464,92 kwintal, produksi hasil ikan hias sebesar 4.719.733 ekor mencapai 100% dari target sebesar 4.719.626 ekor dan rata-rata nilai tambah produk hasil perikanan sebesar 81,28% mencapai 260,51% dari target sebesar 31,2%.

Berdasarkan analisis kinerja dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada pada masing-masing Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis masuk dalam kategori **Sangat berhasil**. Keberhasilan capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari terlaksananya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. SARAN

Dari hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu perlunya upaya yang lebih efektif dan efisien dalam penjaminan ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat. Demikian halnya koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait akan terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan /atau sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar yang telah ditetapkan. Langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :



No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
1	Peningkatan produksi tanaman pangan lebih difokuskan pada peningkatan daya dukung / kapasitas lahan pertanian.	Penyediaan prasarana pertanian (JUT, JITUT)	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian - Kegiatan pembangunan prasarana pertanian - Sub Kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani - Sub Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani 	✓		
		Pelatihan pembuatan Pupuk Organik dan pendampingan PTPS	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyuluhan Pertanian - Kegiatan Pelaksanaan penyuluhan pertanian - Sub Kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa 	✓		✓
2	Peningkatkan pematuhan harga pangan dan stok pangan	Penyusunan SOP Pemantauan harga pangan dan stok pangan di gudang toko pangan dan pasar induk.	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kapuatan/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. - Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 		✓	
		Rapat koordinasi Satgas Pangan Kota Blitar	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penegenakaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 	✓		
3	Pengendalian alih fungsi lahan melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).	Pengajuan Perda LP2B	<ul style="list-style-type: none"> - Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian - Kegiatan Pengembangan prasarana pertanian - Sub kegiatan penyusunan peta kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten/kota 	✓		
4	Peningkatan kualitas evaluasi dan perencanaan kinerja.	Pengembangan aplikasi data pangan, pertanian dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota - Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah - Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 			✓
		Sosialisasi evaluasi kinerja dan tindak lanjut hasil evaluasi		✓		
		Reviu kinerja dan target kinerja tujuan dan sasaran strategis	✓			
5	Peningkatan kualitas dan nilai tambah produk perikanan dan pertanian serta memperluas jangkauan pemasaran	Pelatihan pemasaran hasil perikanan dengan pemanfaatan platform digital	<ul style="list-style-type: none"> - Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan - Kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil - Sub Kegiatan pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil 			✓
		Pelatihan pengemasan hasil olahan perikanan			✓	



No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
6	Peningkatan kualitas dan nilai tambah produk pertanian serta memperluas jangkauan pemasaran	Pelatihan diversifikasi produk hasil pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyuluhan Pertanian - Kegiatan Pelaksanaan penyuluhan pertanian - Sub Kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa 	✓		✓
7	Peningkatan diversifikasi komoditas pertanian	Pelatihan budidaya tanaman hias di Kelompok Wanita Tani (KWT)	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyuluhan Pertanian - Kegiatan Pelaksanaan penyuluhan pertanian - Sub Kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa 		✓	✓





Demikian, semoga dokumen LKjIP ini dapat berguna bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian khususnya sebagai evaluasi untuk perbaikan di masa depan, serta bagi segenap pihak yang berkepentingan.



LAMPIRAN 1.

MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BLITAR TAHUN 2021 - 2026

Visi : Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermartabat
 Misi : Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2023	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2023	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (angka)	Pembobotan 9 (Sembilan) indicator turunan dari 3 (tiga) aspek ketahanan (ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan pangan) IKP dihitung oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional.	73,38	74,68	Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Skor PPH ideal = 100	85,25	86,5	Peningkatan pembangunan bidang ketahanan pangan	Optimalisasi produktivitas sumber daya hewani dan nabati sebagai sumber pangan	Urusan Pangan
											Optimalisasi pencegahan masuk dan keluarnya pangan mengandung bahan berbahaya	
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	83,92	84,71	Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	83,92	84,71	Peningkatan kinerja pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah berbasis kinerja	Urusan Pertanian
											Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif	
Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (miliar rupiah)	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (dalam miliar) yang dikeluarkan oleh BPS Kota Blitar	197,81	196,82	Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura (dalam kwintal)	Jumlah total produksi tanaman pangan dan hortikultura dalam 1 tahun (kwintal)	197.890	198.206,74	Peningkatan produksi tanaman pangan dan tanaman hortikultura	Peningkatan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Urusan Pertanian
											Peningkatan pengendalian Organisme pengganggu tanaman OPT	

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET	
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2023	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2023	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
					 <p>KOTA BLITAR</p> <p>KRIDA HANGGUDU JAYA</p>	<p>Terjaganya produksi hasil peternakan</p>	<p>Jumlah produksi hasil peternakan (dalam kwintal)</p>	<p>Jumlah total produksi hasil peternakan (telur, susu, daging) dalam 1 tahun (kwintal).</p>	<p>83.818</p>	<p>84.651,19</p>	<p>Peningkatan sarana dan prasarana produksi peternakan</p> <p>Peningkatan pelayan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner</p>	<p>Peningkatan ketersediaan sarana pertanian</p> <p>Peningkatan kapasitas SDM petani</p> <p>Penerapan metode budidaya berorientasi agribisnis</p> <p>Peningkatan pemasaran produk tanaman pangan dan hortikultura secara digital</p> <p>Peningkatan pengawasan produksi hasil peternakan ternak</p> <p>Peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak</p> <p>Peningkatan pengawasan produksi hasil peternakan ternak</p> <p>Peningkatan pendampingan unit usaha peternak dan hasil hewan ternak dalam proses sertifikasi halal dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)</p> <p>Peningkatan penanganan penyakit hewan ternak</p>	

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2023	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2023	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
											Peningkatan pengawasan produksi hasil peternakan ternak	
					Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi (dalam kwintal)	Jumlah total produksi ikan konsumsi dalam 1 tahun (kwintal)	2310,3	2464,92	Peningkatan produksi dan pemasaran produk perikanan budidaya	Peningkatan kapasitas SDM pembudidaya perikanan	Urusan Perikanan
					Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias (ekor)	Jumlah total produksi ikan hias (ekor) dalam 1 tahun	4.563.416	4.719.625		Peningkatan pemenuhan benih ikan		
					Rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan	Rata-rata ((nilai output (Rp/Kg)-Sumbangan input lain (Rp/kg)-Harga bahan baku (Rp/kg))/ Nilai output x 100%)	-	31,20		Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berbasis digital		



Blitar, 3 Januari 2023
 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
 PEMERINTAH KOTA BLITAR
 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
 BANTEN J. RODIYAH
 Pembina Utama Muda
 NIP 19630610 199203 2 008

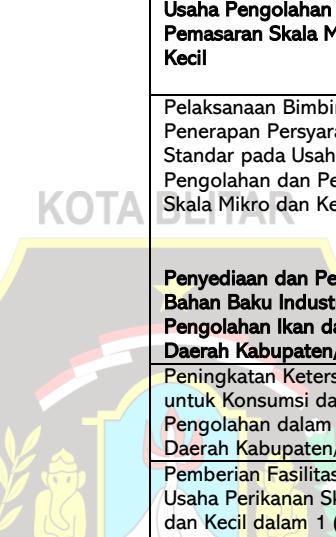
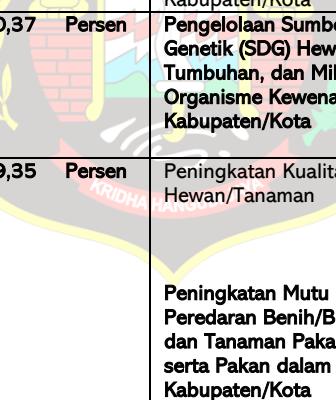
LAMPIRAN 2.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	81 Indeks	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Tepat Waktu dan Sesuai Standar	100 Persen	75.740.622
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	10.034.504
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	65.706.118
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat daerah Sesuai Standar	100 Persen	6.193.375.327
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 orang	6.190.605.223
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5 Laporan	2.770.104
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Sesuai Standar	100 %	189.991.972
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	114.875.000
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	98 orang	75.116.972
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Standar	100 Persen	352.059.900

SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN					
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	12.167.286	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	46.284.930	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	43.281.340	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	30.679.000	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	23.296.942	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	72 Dokumen	14.940.000	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62 Laporan	208.491.731	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Sesuai Standar	100 %	1.398.229.616	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 Laporan	158.887.616	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1.239.342.000	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase BMD yang Terpelihara Sesuai Standar	100 Persen	175.131.998	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 unit	117.872.708	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 unit	57.259.290	
Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	86,5	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	ANGKA KETERSEDIAAN ENERGI PERKAPITA/HARI	2200 kkal/ka pita/ha ri	Penyedian dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Nilai Capaian Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	84 Angka	2.923.970	
				ANGKA KONSUMSI ENERGI PERKAPITA	2010 kkal/ka pita/ha ri	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan	2.923.970	
						Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Konsumsi Protein	57 gr/ka pita/ta hun	120.980.149	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Produksi hasil budidaya ikan konsumsi (dalam kwintal)	2.464,92	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Kelompok Perikanan Budidaya yang Memenuhi Rekomendasi Standart Teknis	13,83 Persen	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan	58.602.069	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	62.378.080	
						PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE BALITA RAWAN PANGAN YANG TERTANGANI	2 Jenis	43.871.250	
						13,83 Persen	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Intervensi Balita Rawan Pangan		
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	43.871.250	
	Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias (ekor)	4.719.625		TINGKAT KEAMANAN PANGAN SEGAR (%)	100 Persen	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Sampel Pangan Segar yang Diuji	67 %	12.600.000	
						Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	12.600.000	
						15,07 Persen	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	29,67 %	145.997.710	
						2,92 Persen	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	1 kelompok	97.358.261	
						Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1 kelompok	48.639.449	
						Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Percentase Pembudidaya Ikan yang Memenuhi Standart Mutu Budidaya Perikanan	1,48 %	364.127.460	
						Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 jenis	341.791.159	
						Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	30 Pembudidaya	22.336.301	

SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Rata-Rata Ratio nilai tambah produk hasil perikanan	31,2	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	VOLUME PENJUALAN HASIL OLAHAN PERIKANAN	34230 juta rupiah		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pelaku Usaha Olahan Hasil Perikanan yang Sudah Memenuhi Standar Mutu	17,39 %	25.622.350
						Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	2 unit usaha	25.622.350
						Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Angka Konsumsi Ikan Perkapita/tahun	18,4 kg/ka p/th	334.018.899
						Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 ton	65.988.030
						Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	40 Pelaku Usaha	268.030.869
Terjaganya produksi hasil peternakan	Jumlah produksi hasil peternakan (dalam kwintal)	84.651,90	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak	20,37 Persen	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peternak yang dibina	13 kelompok	53.536.222
					19,35 Persen	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 jenis	53.536.222
				Persentase pelaku usaha obat hewan yang sesuai standar		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Penggunaan Pakan Ternak yang Sesuai Standar	100 %	32.865.959
						Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	2 Laporan	23.942.036

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN					
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)	100 Persen	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	8.923.923		
						Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengeler	Persentase Obat Hewan yang Sudah Teregister	55 Persen	4.792.454		
						Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	4.792.454		
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana RPH yang ditingkatkan	30 Persen	1.461.053.923		
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3 unit	1.461.053.923		
						Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kejadian Kasus Penyakit Zoonosis	0 kejadian	41.055.509		
						Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	2 Laporan	41.055.509		
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Layanan Laboratorium dan Jasa Medic Veteriner yang Tersedia	60 Persen	134.537.487		
						Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan	17.456.970		
						Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	3 Laporan	117.080.517		
						Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Produk Hewan yang Dibina	36 %	28.337.483		
						Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	19.717.876		
						Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	8.619.607		
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase KIE yang Terlaksana	75 Persen	21.875.417		
						Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	2 Laporan	21.875.417		

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura (dalam kwintal)	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura (dalam kwintal)	198.206,74	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Percentase usaha peternakan dan produk asal hewan yang memenuhi rekomendasi persyaratan teknis	33 Persen	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha produksi pakan ternak yang di keluarkan	1 Rekomendasi	5.525.724	
						Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	2 Laporan	5.525.724	
						Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pengecer obat hewan yang di keluarkan	1 Rekomendasi	5.798.926	
						Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	1 Laporan	5.798.926	
KOTA	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura (dalam kwintal)	198.206,74	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Percentase sarana pertanian yang tersedia	72 Persen	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Percentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	40 %	115.859.596	
						Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Laporan	65.854.301	
						Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	50.005.295	
						Pengembangan Prasarana Pertanian	Percentase Data Dukung Raperda LP2B yang Tersedia	100 Persen	37.352.056	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Percentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik	51,39 Persen	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan /LP2B	1 Laporan	35.232.056	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Dokumen	2.120.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULAN BENCANA PERTANIAN	Percentase Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) sesuai dengan Prosedur	100 Persen	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Percentase Ketersediaan Bahan Pengendalian OPT	13 %	16.149.460	
						Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100 ha	16.149.460	
KOTA	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura (dalam kwintal)	198.206,74	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Percentase Usaha Pertanian yang Memenuhi Standar Rekomendasi teknis	40 Persen	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Pertanian yang Memenuhi Standar Teknis	15 unit	28.018.530	
						Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	28.018.530	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Percentase Rata-rata Peningkatan Nilai Kelas Kelompok Tani	0,93 Persen	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Percentase Petani yang Menerima Peningkatan Kapasitas SDM	35 %	2.328.250.444
				Percentase Kelompok Tani yang Menerapkan Metode Budidaya Berorientasi Agribisnis	9,52 Persen	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 unit	72.482.670
				Percentase Produk Tanaman Pangan, Hortikultura yang dipasarkan secara Digital	25 Persen	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	31 unit	2.251.030.168
						Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3 unit	4.737.606
TOTAL									13.034.629.647



Blitar, 20 Oktober 2023

Plt. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



drh. DEWI MASITOH., M.Agr.

Pembina

NIP 19791206 200604 2 005

LAMPIRAN 3.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **drh. DEWI MASITO, M.Agr.**
Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SANTOSO, M.Pd**
Jabatan : **Walikota Blitar**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran pekerjaan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

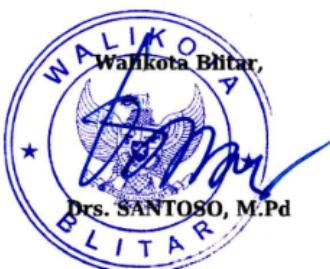
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA BLITAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	86,50(angka)
2	Terjaganya produksi hasil peternakan	Jumlah produksi hasil peternakan	84651,19(kwintal)
3	Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	198206,74(kwintal)
4	Terjaganya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias	4719625,00(ekor)
		Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi	2464,92(kwintal)
		Rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan	31,20(%)
5	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	84,71(angka)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2,328,250,444.00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
2	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	319,641,249.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah
3	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	39,343,180.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	10,456,775.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	16,149,460.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	43,871,250.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	520,125,170.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah
8	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	253,270,146.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
9	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	123,904,119.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
10	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1,498,405,979.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
11	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	217,054,231.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,404,146,514.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Total:		13,774,618,517.00	



LAMPIRAN 4.
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Nama OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Keterangan
1.	Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	84,71	84,77	100,07	Sangat Berhasil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	8.404.146.514	8.124.013.569	96,67	
2.	Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH Konsumsi	Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Skor PPH ideal = 100	86,5	87,7	101,39	Sangat Berhasil	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	123.904.119,00	123.502.163	99,68	
								Program Penanganan Kerawanan Pangan	43.871.250	43.549.640	99,27	
								Program Pengawasan Keamanan Pangan	10.456.775	10.455.850	99,99	
3.	Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah total produksi tanaman pangan dan hortikultura dalam 1 tahun (kwintal)	198.206,74	240.477,00	121,33	Sangat Berhasil	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	125.859.596	121.439.865	96,49	
								Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	37.352.056	37.187.700,00	99,56	
								Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	16.149.460	16.149.460,00	100,00	
								Program Perizinan Usaha Pertanian	28.018.530	27.990.450	99,90	
								Program Penyuluhan Pertanian	2.328.250.444	2.311.973.791	99,30	
4.	Terjaganya produksi hasil peternakan	Produksi hasil peternakan	Jumlah total produksi hasil peternakan (telur, susu, daging) dalam 1 tahun (kwintal).	84.651,00	100.122,81	118,28	Sangat Berhasil	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	91.194.635	85.963.890	94,38	
								Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.461.053.923	1.430.952.202	99,49	

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Keterangan
								Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	253.270.146,00	251.043.179	99,49	
								Program Perizinan Usaha Pertanian	11.324.650	10.533.550	100,00	
5.	Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Produksi hasil budidaya ikan konsumsi	Jumlah total produksi ikan konsumsi dalam 1 tahun (kwintal)	2.464,92	2.485,00	100,81	Sangat Berhasil	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	520.125.170	513.014.530	99,99	
6.	Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Produksi hasil budidaya ikan hias	Jumlah total produksi ikan hias (ekor) dalam 1 tahun	4.719.626	4.719.733	100	Sangat Berhasil	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	319.641.249	313.464.109	99,16	
7.	Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan	Rata-rata ((nilai output (Rp/Kg)-Sumbangan input lain (Rp/kg)-Harga bahan baku (Rp/kg))/ Nilai output x 100%)	31,2	81,28	260,51	Sangat Berhasil					

